Sekuritisasi Isu Kudeta Militer Myanmar Tahun 2021 oleh Indonesia terhadap *Association Southeast Asian Nations* (ASEAN)

Annisa Khairiah[1], Muhammad Yusra[2], Rifki Dermawan[3]

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: annisakhairiah97@gmail.com[1], monsieur.yusra@gmail.com[2], rifkidermawan@soc.unand.ac.id[3]

Abstract

On February 1, 2021, the military junta carried out a coup against the Myanmar government for alleged fraud in the November 2020 election which won Aung San Suu Kyi from the National Lead Democracy (NLD) Party. This coup directly impacted the security of Myanmar's neighboring countries and the international community, resulting in threats to the stability and sovereignity of ASEAN member states in Southeast Asia. This study aims to explain the stages of securitization carried out by Indonesia through President Joko Widodo and Indonesia Foreign Minister, Retno Marsudi, as part of ASEAN. These stages will be analyzed using the concept of securitization, which explains through two stages, raising the issue and convincing the audience. The method in this research uses qualitative method with descriptive approach that utilizes secondary data that has been found. This study found that President Joko Widodo and Indonesia Foreign Minister, Retno Marsudi securitized the issue against ASEAN member countries by making some efforts and giving various statements. These statements form an idea construction that the issue of Myanmar's military coup is a threat and requires collective emergency action. At the stage of raising the issue, Indonesia was the country that responded to the issue of the Myanmar military coup and was assisted by several functional actors outside the region. At the stage of convincing the audience, Indonesia held a bilateral meeting with the Prime Minister of Malaysia, a meetingwith the Minister of Foreign Affairs of Myanmar, doing shuttle diplomacy and issued a series of statements to its audience. From this stage, it was found that Indonesia succeeded in legitimizing the issue of the Myanmar coup, thereby making ASEAN reach a consensus by holding the ASEAN Leader's Meeting (ALM) and forming five-point consensus.

Keywords: *Indonesia, Joko Widodo, Myanmar Military Coup,Retno Marsudi, Securitization.*

PENDAHULUAN

Kudeta Myanmar yang terjadi sejak bulan Februari 2021 silam melibatkan Aung San Suu Kyi sebagai presiden terpilih, militer junta Myanmar, dan rakyat sipil Myanmar yang menginginkan pemerintahan demokrasi. Konflik ini sudah mulai memanas sesaat setelah keluarnya hasil pemilu November tahun 2020 yang memenangkan Aung San Suu Kyi sebagai presiden terpilih dari partai

National League for Democracy (NLD) (Luthfy Ramiz, 2022). Namun, kemenangan pemilu tersebut dianggap oleh militer junta sebagai hasil dari kecurangan yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi. Kondisi ini membuat militer junta mengambil alih pemerintahan sementara dan menetapkan status masa darurat nasional selama satu tahun terhitung sejak 1 Februari 2021. Tindakan ini dilakukan militer junta atas dasar untuk menjaga amanat konstitusi yang disahkan pada tahun 2008.

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar saat ini nyatanya menjadi sebuah ancaman yang berdampak pada berbagai aspek. Ancaman tersebut tidak hanya berdampak bagi domestik Myanmar saja, namun juga berdampak pada negara-negara tetangga Myanmar di kawasan Asia Tenggara. Jika ancaman tersebut terus dibiarkan, maka akan menghasilkan dampak yang sangat serius. Ancaman yang ditimbulkan oleh peristiwa kudeta Myanmar ini secara lebih luas juga telah menjadi sorotan oleh berbagai negara dan organisasi internasional di luar kawasan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Amerika Serikat bahwa mereka menyerukan agar Myanmar kembali ke jalur demokrasi dan mendesak rezim militer untuk mengakhiri kekerasan sehingga jalan menuju dialog yang menyeluruh dapat dilanjutkan.

Fokus dunia tidak hanya terletak pada Myanmar, tetapi juga ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara untuk mengambil tindakan atas peristiwa ini. Sebagai satu-satunya organisasi kawasan, tentu ASEAN harus mampu menjaga sentralitasnya dalam peristiwa ini. Berbagai upaya mulai dilakukan ASEAN, seperti penyelenggaraan ASEAN *Leaders Meeting* (ALM) yang menghasilkan *five point consensus*. Dalam melakukan upaya tersebut, ASEAN nyatanya mengalami gejolak internal tersendiri. Gejolak internal tersebut berasal dari perbedaan pendapat yang didasarkan pada pandangan tiap negara anggota terhadap prinsip *non-interference* ASEAN.

Negara-negara seperti Filipina, Kamboja, dan Thailand melihatnya sebagai masalah internal Myanmar dan tidak berkomentar lebih jauh karena

pernah merasakan perjuangan membentuk pemerintahan yang demokratis. Di sisi lain, Singapura dan Malaysia mengecam tindakan kejahatan yang dilakukan Junta militer serta seruan pada semua pihak di Myanmar untuk menahan diri. Sedangkan Vietnam, Brunei Darussalam, dan Laos memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan apapun (Hendra Manurung, 2021).

Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang menentang terjadinya kudeta militer di Myanmar dan menginginkan ASEAN mengambil langkah yang darurat untuk mengatasi memburuknya situasi di Myanmar. Hal ini didasari oleh terjadinya krisis kemanusiaan di Myanmar dengan banyaknya korban jiwa dan perang senjata antara militer dan masyarakat sipil. Selain itu, terjadinya kudeta menunjukkan bahwa gagalnya Myanmar menjadi negara demokrasi yang menunjukkan bahwa gagalnya Indonesia dalam mendorong terjadinya demokrasi yang baik di Myanmar yang diupayakan sejak dahulu (Chandra Purnama, 2019).

Adanya desakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedudukan Indonesia sebagai negara yang berpengaruh besar di kawasan Asia Tenggara, sekaligus pendiri dan penggerak ASEAN, juga memperkuat alasan Indonesia untuk terlibat dalam penyelesaian kasus ini. Sejauh ini, Indonesia telah melakukan berbagai upaya langsung maupun tidak langsung, diantaranya melaksanakan dialog melalui pendekatan *shuttle diplomacy* ke tiga negara anggota ASEAN yakni Malaysia, Brunei, Thailand, dan Singapura secara bergantian. Pendekatan itu dilakukan dengan berdialog secara langsung bersama Perdana Menteri maupun Menteri Luar Negeri keempat negara tersebut. Pada saat kunjungan ke Thailand, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga berbincang langsung dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, U Wunna dan menyampaikan kepadanya bahwa Indonesia "concern" terhadap perkembangan situasi di Myanmar.

Penjelasan di atas telah memperlihatkan bahwa isu kudeta Myanmar merupakan sebuah ancaman bagi kestabilan negara-negara kawasan Asia Tenggara sekaligus menjadi *concern* bagi aktor-aktor internasional di luar kawasan tersebut. Indonesia sebagai *founding father* dan penggerak ASEAN,

tentu merasa memiliki keharusan untuk berkontribusi sesuai dengan posisi yang dimilikinya dalam isu ini. Oleh sebab itu, tulisan ini akan berupaya untuk menganalisis mengenai upaya sekuritisasi yang dilakukan Indonesia dalam menjadikan isu kudeta Myanmar ini sebagai isu keamanan yang membutuhkan tindakan darurat di ASEAN sehingga konsensus di dalam ASEAN dapat tercapai.

METODE

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dimulai dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka yang berasal dari sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku, berita, dan *website* resmi. Data yang didapatkan kemudian penulis kumpulkan dan rangkum dalam bentuk narasi deskriptif. Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian deskriptif, di mana penulis akan memberikan analisis mengenai sekuritisasi kudeta militer Myanmar yang dilakukan oleh Indonesia terhadap ASEAN. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan konsep sekuritisasi yang dicetuskan oleh Barry Buzan, Ole Weaver, dan Jaap de Wilde. Konsep ini dikemukakan dalam buku yang berjudul: *A New Frame Work for Analysis* yang menjelaskan bahwa sekuritisasi terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap pemunculan isu dan tahap meyakinkan *audience* (target).

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan lima tinjauan pustaka yang salah satunya membahas tentang pengaruh kudeta militer Myanmar terhadap stabilitas kawasan ASEAN pada tahun 2021. Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana ASEAN mencari jalan keluar terhadap kudeta militer Myanmar agar kestabilan kawasan Asia Tenggara tetap terjaga. Kudeta militer Myanmar mengakibatkan suara ASEAN terpecah dikarenakan beberapa negara anggota ASEAN memiliki perbedaan pandangan dalam merespon adanya keinginan untuk mengintervensi Myanmar. Tulisan ini berkontribusi dalam memberikan sudut pandang dan informasi lebih detail bagi penulis dalam melihat bagaimana respon ASEAN terhadap kudeta Myanmar yang nantinya akan membantu dalam melengkapi

penjelasan penulis pada bab selanjutnya. Perbedaan antara tulisan ini dan penelitian penulis terletak pada masalah yang ingin penulis analisis yaitu sekuritisasi isu kudeta militer Myanmar yang dilakukan oleh Indonesia terhadap ASEAN itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Pemunculan Isu Kudeta Militer Myanmar sebagai Ancaman bagi ASEAN

Tahapan ini terlihat ketika kudeta militer Myanmar tahun 2021 baru saja terjadi dan belum muncul respon dan perdebatan dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kudeta militer Myanmar tersebut terjadi pada tanggal 1 Februari 2021 dini hari yang memuncak beberapa jam sebelum parlemen baru akan mengadakan sidang parlemen untuk yang pertama kalinya pada tanggal yang sama. Pada waktu dini hari, militer menahan beberapa orang pemimpin partai NLD, termasuk Presiden Win Myint dan Perdana Menteri Aung San Suu Kyi. Setelah penahanan tersebut, militer menyerahkan kekuasaan kepada panglima tertinggi, Jenderal Min Aung Hlaing dan menyatakan keadaan darurat selama satu tahun. Melalui kudeta tersebut, Jenderal Min Aung Hlaing berjanji untuk mengadakan pemilihan yang adil dan menyerahkan kekuasaan kepada pihak yang menang.

Beberapa waktu setelah terjadinya kudeta, situasi di Myanmar kian memburuk. Hal ini ditandai dengan munculnya gejolak protes pertama pada tanggal 2 Februari 2021. Mulanya orang-orang membunyikan panci dan wajan serta membunyikan klakson mobil sebagai protes terhadap kudeta. Protes ini terjadi lebih besar pada hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 3 Februari 2021. Protes ini dilakukan dalam bentuk mogok massal yang diumumkan oleh pegawai pemerintah, guru, dan dokter dengan cara meninggalkan pekerjaannya masing-masing.

Memburuknya situasi di Myanmar setiap harinya ternyata telah menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Hal ini terlihat dari diskusi yang dilakukan oleh Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin pada saat kunjungan yang dilakukannya ke Jakarta, pada tanggal 5 Februari 2021. Presiden Joko Widodo menyatakan "Kita prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar dan kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku". Dari pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut, telah terlihat tutur kata 'kita' dan 'prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar…' merupakan *nature of threat*, di mana Presiden Jokowi menyiratkan bahwa kondisi politik di Myanmar merupakan pertanda tidak baik bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin setelah pertemuan di Istana Negara, Jakarta setelah pembahasan penguatan kerja sama kedua negara.

Presiden Jokowi pada kesempatan yang sama juga mengatakan, "*To demonstrate the vision of the Asean community, it is important for all of us to continue to respect the principles of the Asean Charter, especially the principles of rule of law, good governance, democracy and human rights and constitutional governance,*" Dalam penuturan '*it is important for all of us to continue to respect the principles of the ASEAN Charter…*' menyiratkan bahwa meskipun kudeta Myanmar merupakan ancaman, akan tetapi tetap harus menghormati prinsip-prinsip Piagam ASEAN, yang bermakna solusi *bagi nature of threat*. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengutus masing-masing Menteri luar negeri mereka untuk membentuk usulan adanya pertemuan khusus menteri di ASEAN. Dalam berbagai pernyataan tersebut, terlihat bahwa Presiden Joko Widodo menaruh perhatian yang besar kepada Myanmar sejak kudeta militer terjadi. Keseriusan Indonesia tersebut ditanggapi Perdana Menteri Malaysia dengan sebuah kesetujuan yang terlihat melalui pernyataannya, "*Like Indonesia, Malaysia is also serious about the current political situation in Myanmar which is a step backwards in the country's democratic process*."

Terjadinya kudeta militer di Myanmar ternyata juga telah menjadi sorotan bagi aktor lain di luar kawasan seperti PBB. Sekretaris Jenderal Stephane Dujarric yang merupakan juru bicara PBB mengatakan, *"... strongly condemns all forms of violence as the multidimensional crisis continues to deteriorate and fuel serious regional implications*.". Pada tutur kata '*serious regional implication*', Sekjen Stephane Dujjaric memunculkan isu Myanmar sebagai sebuah ancaman yang berimplikasi pada kawasan. Dengan kata lain, isu Myanmar dimunculkan sebagai *nature of threat*. Selain itu, adanya pernyataan tersebut juga mengisyaratkan agar isu kudeta militer Myanmar menjadi perhatian bagi ASEAN sebagai satu-satunya organisasi kawasan karena '*serious regional implications*' yang ditimbulkannya.

Terhitung dari sejak mulainya kudeta militer Myanmar terjadi, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021, media massa dan pers juga mulai gencar mendukung untuk melakukan pemberitaan mengenai kondisi terkini seputar kudeta militer Myanmar. Media massa seperti Kompas.com juga mengutip perkataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, yang menyatakan "...ASEAN tidak boleh bergerak mundur.." yang merupakan *point of no return* dari *speech act* yang menyiratkan bahwa Scot Marciel meminta dan mendesak ASEAN agar terus mengupayakan segala cara dalam mengatasi ancaman kudeta bagi kawasan Asia Tenggara. Dalam kalimat yang sama, Scot Marciel juga menambahkan "Harus ada tindak lanjut yang mendesak dan tindakan untuk penundaan" yang merujuk kepada solusi bagi ASEAN terhadap kudeta Myanmar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemunculan isu kudeta militer Myanmar sebagai isu penting dalam perpolitikan ASEAN sudah ada kudeta militer Myanmar baru terjadi. Negara di kawasan Asia Tenggara yang merespon isu kudeta militer Myanmar sesaat setelah kudeta terjadi yakni Indonesia dan Malaysia pada tanggal 5 Februari 2021. Melalui pertemuan bilateral tersebut, Presiden Jokowi menuturkan bahwa beliau prihatin terhadap

perkembangan politik di Myanmar dan pemaknaan kata 'kita' dalam konteks kawasan yang merujuk kepada Indonesia dan Malaysia sebagai negara anggota ASEAN. Selain itu, media massa dan aktor di luar ASEAN seperti Stephane Dujarric yang merupakan juru bicara PBB, dan Scot Marciel yang merupakan Duta Besar Amerika Serikat juga turut membantu Indonesia dalam upaya memunculkan isu agar muncul dorongan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk bertindak dan merespon isu kudeta militer Myanmar.

Tahapan *Speech Act* Indonesia untuk Meyakinkan *Audience*

Tahapan ini penting untuk dibahas karena tahap ini merupakan proses penting dari terjadinya sekuritisasi. Pada tahapan inilah akan terlihat bagaimana *securitizing actors* melakukan konstruksi isu melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya untuk mempengaruhi target (audience) melalui *speech act*.

1. Pernyataan Presiden Republik Indonesia pada Pertemuan Bilateral Indonesia dan Malaysia

Sebagai respon atas kudeta yang terjadi di Myanmar, usai pertemuan di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menyatakan bahwa, "*…We fear the political unrest in Myanmar could disturb the security and stability in this region.*", yang merupakan tutur *nature of threat*, di mana Perdana Menteri Malaysia menyatakan secara gamblang bahwa situasi politik di Myanmar mengancam keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Malaysia tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagai anggota ASEAN, Malaysia menilai bahwa kudeta militer Myanmar mengancam keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dalam tahap meyakinkan *audience* yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi yakni Indonesia, respon Perdana Menteri Malaysia merupakan keberhasilan bagi Indonesia dalam menyamakan pemikiran dengan target atau lawan bicaranya.

2. Pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia melalui Upaya *Shuttle Diplomacy*

Pada tanggal 16 hingga 17 Februari 2021, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berkunjung ke Brunei Darussalam dan melakukan pertemuan dengan Menlu Brunei Darussalam, Dato Erywan Yusof sekaligus melakukan kunjungan kehormatan kepada Sultan Brunei Darussalam. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan keprihatinan dan pernyataan "...setiap negara anggota ASEAN wajib untuk menghormati nilai-nilai yang tertuang pada Piagam ASEAN. Nilai-nilai tersebut berisi tentang penguatan demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, kepatuhan hukum, melindungi dan mempromosikan HAM dan kebebasan fundamental". Dalam kalimat tersebut, Indonesia secara tersirat menegaskan solusi terhadap isu yang terjadi yaitu penghormatan terhadap nilai-nilai dalam Piagam ASEAN. Selain itu, tutur kata tersebut juga peringatan secara tersirat kepada Myanmar bahwa pemerintah militer Myanmar telah melanggar HAM dan hak-hak fundamental masyarakat sipil. Pendapat Menteri Luar Negeri tersebut juga disetujui oleh Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam melalui pernyataan yang diberikan masing-masing negara dalam pertemuan tersebut.

Dukungan terhadap Indonesia dan ASEAN sebagai satu-satunya organisasi kawasan, juga diperlihatkan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dan juga Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken. Hal ini ditandai dengan keluarnya resolusi Special Session ke-29 dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengenai human rights implications on the crisis in Myanmar yang salah satunya berisi desakan agar militer tidak menggunakan kekerasan apapun terhadap rakyat sipil. Amerika Serikat juga memberikan dukungan dalam bentuk larangan bagi pemerintah militer untuk menggunakan *Facebook* untuk mempengaruhi *audience* sebagai salah satu platform terbesar dari Amerika Serikat. Larangan tersebut diberlakukan atas dasar 'kekerasan mematikan' yang merupakan pemaknaan dari poin *nature of threat* pada *speech act* oleh Amerika Serikat yang dilakukan oleh militer junta kepada rakyat sipil Myanmar sejak kudeta terjadi.

Negara yang dikunjungi Indonesia selanjutnya adalah Singapura pada tanggal 18 Februari 2021. Kunjungan yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno ini juga diperuntukkan untuk membahas permasalahan yang sama bersama Menteri Luar Negeri Singapura, Dr Vivian Balakrishnan. Kedua menteri bertukar pandangan mengenai penegasan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam kerangka kerja sama ASEAN ke depannya melalui pernyataan "seluruh pihak dapat mengedepankan dialog untuk mencapai resolusi damai…". Melalui tutur kata tersebut, kedua negara secara tersirat menginginkan ASEAN untuk memfasilitasi terjadinya dialog yang konstruktif. Menteri Luar Negeri Balakrishnan juga mendesak semua pihak yang terlibat untuk menahan diri dan mengambil langkah- langkah mendesak untuk meredakan situasi. Dia menekankan bahwa militer dilarang untuk menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap warga sipil yang tidak bersenjata.

Negara terakhir yang menjadi kunjungan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam upaya shuttle diplomacy nya adalah Thailand yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2021. Namun, berbeda dengan negara-negara kunjungan Indonesia sebelumnya, dalam kasus ini Thailand memiliki kondisi yang khusus. Thailand memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Myanmar serta di bawah kekuasaan militer yang sama, yakni militer junta. Hal tersebut juga diperkuat dengan respon Thailand yang menempatkan bahwa situasi yang terjadi di Myanmar merupakan urusan domestik Myanmar.

Dengan adanya kondisi khusus tersebut, tentu tidak mudah bagi Indonesia untuk meyakinkan Thailand bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan bersama yang membutuhkan tindakan yang darurat. Namun, Indonesia berupaya untuk menanggapi kegelisahan Thailand dengan kembali menekankan posisi Indonesia dalam permasalahan yang terjadi di Myanmar, yakni "…keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar, memulihkan transisi demokrasi yang inklusif, dan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip yang ada di dalam Piagam ASEAN". Dalam pemaknaan tutur kata tersebut Menlu Retno

Marsudi secara tegas mengutarakan keberpihakan Indonesia terhadap rakyat Myanmar tanpa menyinggung mengenai militer Junta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah mendiskusikan mengenai rencana pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan pada akhirnya Thailand menyampaikan kesetujuannya mengenai pertemuan tersebut.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi juga sempat bertemu dan berdiskusi dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, U Wunna Maung Lwin ketika Indonesia sedang melakukan kunjungan dalam upaya *shuttle diplomacy* di Thailand. Dalam pertemuan yang dilakukan dengan U Wunna, Retno Marsudi menyampaikan terkait posisi Indonesia secara konsisten, dengan menyatakan "Indonesia *concern* terhadap perkembangan situasi di Myanmar; kemudian *safety and wellbeing of the people* menjadi prioritas nomor satu. Oleh karena itu, kita meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan untuk menghindari kemungkinan terjadinya korban dan pertumpahan darah… dan selain itu, Indonesia akan bersama dengan rakyat Myanmar." Melalui pemaknaan tutur 'concern' dan '…prioritas nomor satu, Indonesia berusaha untuk menegaskan dan penekanan terhadap keberpihakan Indonesia kepada rakyat Myanmar. Dalam sumber lain, Retno Marsudi juga mengeluarkan sebuah slogan yaitu "*to do nothing is not an option*" yang merupakan tutur *point of no return* yang menyiratkan bahwa Indonesia mendeklarasikan bahwa semua pihak tidak boleh berdiam diri dan membiarkan konflik tersebut terus terjadi.

Melalui *shuttle diplomacy* ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berusaha memperlihatkan bahwa isu kudeta militer Myanmar ini merupakan isu yang sangat serius dan membutuhkan tindakan cepat. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan bahkan di tengah pandemi Covid-19 yang pada saat itu sangat beresiko bagi semua pihak. Melalui *shuttle diplomacy* tersebut, terlihat bahwa Menteri Luar Negeri berusaha mendorong ketiga negara agar dapat merespon dengan cepat dan menyamakan pemikiran dengan Indonesia sehingga solusi penyelesaian untuk permasalahan Myanmar segera terlihat.

3. Indonesia sebagai Inisiator ASEAN *Leaders Meeting* 2021

Adanya pertemuan khusus antar Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN menghasilkan dorongan lebih lanjut dari Indonesia untuk mengadakan ASEAN *Leaders Meeting* (ALM). Dorongan tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Maret 2021 dalam pernyataan presiden pada laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa, "Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan dukacita dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar. Dan Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan… Indonesia juga mendesak agar dialog, agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, untuk memulihkan perdamaian, dan untuk memulihkan stabilitas di Myanmar. Saya akan segera melakukan pembicaraan dengan Sultan Brunei Darussalam sebagai Ketua ASEAN, agar segera dimungkinkannya diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang membahas krisis di Myanmar."

Dalam pernyataan presiden tersebut, pemaknaan kata 'penggunaan kekerasan di Myanmar' dan desakan dari Indonesia dimaknai sebagai *nature of threat* yang ditampilkan pada *speech act* Indonesia. Selain itu, tutur kata tersebut juga menyiratkan bahwa penegasan posisi Indonesia dalam isu kudeta militer Myanmar. Pada kalimat terakhir, Presiden Jokowi menyatakan janji dan menginginkan agar audiencenya mendukung keinginan yang kuat dari Indonesia untuk mendorong terjadinya ALM agar situasi di Myanmar dapat diatasi.

Merujuk kepada pengertian *securitized*, sekuritisasi yang dilakukan Indonesia hanya dapat dikatakan berhasil ketika Indonesia dapat melegitimasi isu tersebut (isu tersekuritisasi) dan membuat ASEAN mencapai konsensus yang menghasilkan tindakan darurat dan terukur. Jika tidak tercapai legitimasi, maka Indonesia hanya dapat disebut melakukan gerakan sekuritisasi, tetapi bukan menjadikan isu sebagai isu yang tersekuritisasi. Dalam penelitian ini, Indonesia

telah mencapai tahapan ini ketika Indonesia telah berhasil menyamakan pemikiran dan pandangan negara anggota ASEAN yang dibuktikan dengan tercapainya konsensus dan terbentuknya act atau tindakan bersama yang terukur sebagai hasil dari politisasi.

Terselenggaranya ASEAN *Leaders Meeting* (ALM) pada tanggal 24 April 2021 merupakan salah satu bukti bahwa pertemuan Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN berhasil. Hal ini dapat dikatakan berhasil karena seluruh negara-negara anggota menghadirkan perwakilan pemimpin negara dalam pertemuan ALM yang dilaksanakan di Indonesia, termasuk negara Myanmar. Thailand dan Filipina yang pada awalnya tidak ingin ikut campur atas permasalahan yang terjadi di Myanmar pada akhirnya ikut bergabung dalam ALM. Brunei Darussalam sebagai ketua ASEAN yang awalnya memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kudeta militer Myanmar justru pada akhirnya mengetuai pertemuan ALM di Jakarta meskipun pada saat itu dunia sedang dilanda pandemi Covid-19.

Pertemuan ALM tersebut kemudian menghasilkan *five point consensus* yang merupakan hasil dan puncak dari tahapan sekuritisasi yang dilakukan oleh Indonesia. *Five point consensus* dapat dianggap hasil dan puncak sekuritisasi karena, terbentuknya *five point consensus* tersebut menandakan bahwa telah terjalin kesepakatan di dalam ASEAN yang melibatkan 10 negara yang mengatur tentang lima upaya ASEAN dalam menyelesaikan isu kudeta militer Myanmar. Tercapainya kesepakatan dalam ASEAN tersebut merupakan bukti bahwa tercapainya konsensus pada tahapan *securitized* pada tingkat regional sekaligus membuktikan bahwa isu kudeta militer Myanmar telah menjadi agenda keamanan bersama di ASEAN. Selain itu, *five point consensus* ini juga merupakan *act* atau tindakan bersama yang dihasilkan setelah proses sekuritisasi yang sebelumnya dilakukan Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam tahap pemunculan isu kudeta Myanmar sebagai ancaman bagi ASEAN, Indonesia merupakan salah satu negara yang merespon terjadinya isu kudeta militer Myanmar yang pada saat itu, belum menjadi perbincangan di negara- negara kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga dibantu oleh media massa dan aktor lain seperti PBB dan Duta Besar Amerika Serikat untuk membingkai isu kudeta sebagai isu yang mengancam bagi kawasan Asia Tenggara. Pada tahap meyakinkan ASEAN sebagai *audience*, Indonesia melalui Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan serangkaian upaya dan mengeluarkan berbagai pernyataan. Pernyataan tersebut disampaikan pada pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia, pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Myanmar, serta upaya *shuttle diplomacy* yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia ke negara Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Politisasi isu yang dilakukan Indonesia nyatanya berhasil membuat isu kudeta militer Myanmar di ASEAN menjadi isu prioritas dan membutuhkan tindakan darurat. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Indonesia telah mencapai legitimasi isu dan mendapatkan keyakinan *audience* ketika Indonesia berhasil membuat ASEAN mencapai konsensus dan terbentuknya act atau tindakan bersama dari tahap politisasi sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aljazeera. 2022. “Myanmar Coup: A Year of Protest, Reprisals, and Diplomatic Inertia”. Februari 1, 2022. https://www.aljazeera.com/news/2022/2/1/myanmar- coup-a-year-of-protest-reprisals-and-diplomatic-inertia.

Amable, Dennis Senam. “Theorizing the Emergence of Security Regions: An Adaptation for the Regional Security Complex Theory”, Global Studies Quarterly, No. 2, (2022): 1-10

Arshad, Arlina. 2021. “Indonesian and Malaysian Leaders Express Concerns over Myanmar coup, Seek Asean Meeting”. Februari 5, 2021. https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesian-and-malaysian-leaders-voice-concerns-over-myanmar-military-coup-seek-asean.

Asia, Channel News. 2021. “ASEAN Chair Brunei Calls for ‘Dialogue, Reconciliation, and Return to Normalcy’ in Myanmar”. Februari 1, 2021. https://www.channelnewsasia.com/asia/myanmar-asean-aung-san-suu-kyi- military-coup-296211.

Bonasir, Rohmatin. 2021. “Kudeta Myanmar : Mengapa Indonesia diharapkan Membantu Mengatasi Krisis Politik 'Sahabat Lama'”. Maret 1, 2021. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56222076.

Buzan, Barry, Ole Waever, dan Jaap de Wilde. Security: A New Framework for Analysis. Colorado: Lynne Rienner Publisher Inc, 1998.

Buzan, Barry. People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post- Cold War Era. Brighton: Harvester-Wheatsheaf, 1991.

Creswell, John W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches. University Nebraska: Sage Publication, 2017.

Dermawan, Windy. "Indonesia Constructive Engagement to Support Democracy in Myanmar." Jurnal Wacana Politik 1, no. 2 (Oktober 2016): 166-174.

Haacke, Jürgen, dan Paul D. Williams. "Regional Arrangements, Securitization, and Transnational Security Challenges: The African Union and the Association of Southeast Asian Nations Compared." Security Studies 17 (2008): 785-786.

Indrawan, Jerry, dan Rizky Ridho Pratomo. "Mekanisme Resolusi Konflik di ASEAN: ASEAN Sebagai Fasilitator Konflik." Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional 17, no. 2 (2021): 172-185.

Ivana S.D.J, Faustina, Euneke Dewi T, dan Fiki Rahmatina N. "Kudeta Myanmar : Junta Militer di Era Modern." Jurnal Pena Wimaya 1, no. 1 (Juni 2021): 43-58.

Manurung, Hendra. "Myanmar Unresolved Political Development: A Threat to ASEAN Unity and Democracy." European Journal of Science, Innovation, and Technology 1, no. 2 (Juni 2021): 1-15.

Manurung, Hendra, dan Teuku Rezasyah. "ASEAN Consensus to End Myanmar's Political Crisis." Research Gate, 2022: 1-7.